

RESEARCH ARTICLE

Dampak Pelanggaran HAM 1965 (Pengaruhnya Terhadap Peluang Pendidikan Kaum Muda Indonesia)

Tobias Kardiman✉ dan Pius Pandor ✉

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang -Jawa Timur

✉ tobiasosm@gmail.com, piuspandor@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on the impact of the 1965 Human Rights (HAM) violations on the educational opportunities of the younger generation in Indonesia. The harsh circumstances of that time had a detrimental impact on educational opportunities. The method used in this writing is literature, namely analyzing previous research that is relevant to the theme discussed. The results of this study found that the difficult situation that occurred in 1965 greatly influenced the education process for Indonesia's young generation. This situation is very important to know, to explore so that the dark events of the past will not happen again under any circumstances. At that time, many young people had difficulty continuing their education, especially those who wanted to continue their education abroad. The results of this research indicate that there is a need for further efforts to promote fair access to education to overcome the trauma still felt by Indonesia's young generation as a result of human rights violations in 1965. In addition, there is an inclusive and equitable education policy to ensure that Indonesia's young generation has equal and sustainable educational opportunities.

Keywords: Youth, violations, human rights, education.

ABSTRAK

Studi ini meletakkan fokus pada dampak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1965 terhadap peluang pendidikan generasi muda di Indonesia. Situasi berat pada masa itu telah memberikan dampak buruk terhadap peluang pendidikan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan yaitu menganalisis penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang dibahas. Hasil studi ini menemukan bahwa situasi berat yang terjadi pada masa tahun 1965 sangat mempengaruhi proses pendidikan bagi generasi muda Indonesia. Situasi ini sangat penting untuk diketahui, digali agar peristiwa kelam masa lampau tidak akan terjadi lagi dalam situasi apapun. Pada masa itu banyak kaum muda yang mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan khususnya mereka yang hendak melanjutkan pendidikan di luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mempromosikan akses pendidikan yang adil untuk mengatasi trauma yang masih dirasakan oleh generasi muda Indonesia sebagai akibat dari pelanggaran HAM tahun 1965. Selain itu

adanya kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki peluang pendidikan yang setara dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Kaum Muda, pelanggaran, HAM, pendidikan.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia pernah mengalami peristiwa kelam yang mengganggu harmoni kehidupan martabat luhur manusia. Sejak lahirnya bangsa Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari berbagai situasi kejahatan kemanusiaan salah satunya adalah peristiwa G30S PKI. Sejarah kelam yang menjadi catatan bangsa Indonesia adalah kejahatan kemanusiaan di tahun 1965. Berdasarkan sumber dan serpihan cerita dari korban saksi dan pelaku terlukiskan gambaran peristiwa yang sangat tragis yakni pembunuhan manusia secara massal.¹ Konflik politik, prasangka rasial, curiga, kebencian, egoisme seakan-akan menjadi fondasi kehidupan yang terus menerus mengalir pada masa itu. Tumpahan dara mereka yang dituduh sebagai bagian dari PKI membasahi tanah bagaikan aliran air pada musim hujan.

Di kalangan masyarakat sipil banyak yang di bunuh di luar proses hukum, ditangkap dan ditahan sewenang-wenang tanpa proses peradilan, disiksa, diperkosa hingga kehilangan harta benda. Ada banyak masyarakat yang berdiam diri membisu pasrah karena ketakutan, trauma. Masyarakat Indonesia nyaris kehilangan harapan akan masa depan khususnya peluang pendidikan bagi kaum muda.² Banyak keluarga yang terkena dampak langsung dari peristiwa tersebut, dengan anggota keluarga yang ditahan dan hilang begitu saja. Dalam konteks pendidikan, pelanggaran HAM tersebut mengakibatkan banyak anak muda kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi atau bahkan pendidikan dasar yang layak. Generasi muda terpaksa putus sekolah karena berbagai faktor seperti kehilangan orang tua atau ketidakstabilan ekonomi keluarga.³ Pada masa ini kaum muda hidup dalam ruang lingkup ketidakpastian karena hidup dibawah tekanan yang menghambat semangat belajar. Banyak kaum muda yang mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan khususnya mereka yang hendak melanjutkan pendidikan di luar negeri. Di samping itu ada juga mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri sulit kembali ke Indonesia karena paspornya dicabut.⁴

Pada masa ini masyarakat Indonesia nyaris kehilangan harapan semuanya mesti berakhir dengan pembunuhan, penderitaan karena ketidakadilan, perasaan keluarga korban merasa terganggu. Berhadapan dengan realitas ini memungkinkan Indonesia terus ke depan dan harus memperhatikan keuhuran martabat manusia.⁵ Setiap kehidupan manusia selalu mendambakan kehidupan yang sejahtera adil, masyarakat yang baik dan memiliki

¹ Aulia; Ramolan and Siti Fatimah, "Yayasan Pejuang Hak Eks-Tapol 1965: Studi Pada YPKP 1965 Sumatera Barat," *Kronologi* 3, no. 3 (2021): 14–26.

² Dwinitas Ayuni Larasati, "Identitas Eksil Dalam Film Surat Dari Praha," no. 4 (2019): 1–12.

³ Anung Jati Nugraha Mukti and Johan Inda Permana, "Membicarakan Sejarah Kontroversial: Historiografi, Ingatan Masyarakat Dan Pendidikan Sejarah Di Indonesia," *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya* 17, no. 1 (2023): 105, <https://doi.org/10.17977/um020v17i12023p105-122>.

⁴ Dwinitas Ayuni Larasati, "Identitas Eksil Dalam Film Surat Dari Praha."

⁵ Ayu Nurmalayani, Burhanuddin, and Johan Mahyudi, "Subjek Kolektif Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye Yang Mencerminkan Sejarah PKI: Kajian Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann," *Mabasan* 15, no. 2 (2021): 201–20, <https://doi.org/10.26499/mab.v15i2.424>.

kapasitas untuk berdamai dan tidak menaru curiga. Dewasa ini kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai macam kejahatan kemanusiaan yang hampir setara dengan peristiwa 1965.⁶

Ketidakadilan diskriminasi dan polotik identitas semakin marak. Manusia hidup dalam samar-samar kebaikan yang dibalut dengan kejahatan segelintir orang yang berusaha untuk menyenyapkan yang lain secara halus tanpa dirasakan secara langsung oleh korban. Akses pendidikan disetiap daerah tidak merata sekolah-sekolah yang elit hanyalah dimiliki oleh kelompok-kelompok kaya. Realitas inilah yang membuat orang miskin terus miskin, misalkan di daerah pedalaman Kalimantan, papua dan daerah lain banyak anak-anak yang tidak mendapatkan stabilitas pendidikan.⁷

Sejatinya peristiwa kelam 1965 adalah tema yang masih sangat relevan untuk terus kaji sebagai bentuk rekonsiliasi demi tercapainya pendidikan yang merata di Indonesia.⁸ Pengakajian itu tidak bermaksud untuk membangkitkan dendam korban melainkan memastikan bahwa pelanggaran ham 1965 tidak akan terulang lagi. Selain itu memberikan wawasan tentang peran kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memulihkan martabat manusia yang menjadi korban pelanggaran HAM1965. Dalam sejarah bangsa Indonesia peristiwa G30S merupakan situasi hidup manusia yang tidak bisa dilupakan melainkan selalu ada upaya rekonsiliasi agar Indonesia sungguh-sungguh menjadi bangsa yang berpijak pada kedamaian, keadilan dan kesejahteraan bersama sebagai warga negara Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan yakni menganalisis dan mengelaborasi penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang dibahas. Metode ini membantu penulis dalam penelitian untuk menggali peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1965 dan pengaruhnya terhadap peluang pendidikan kaum muda Indonesia. Penulis menggali dari buku-buku yang mengisahkan kesaksian keluarga korban dan pelaku pembunuhan. Menarik untuk dikaji bahwa kecemasan dan penderitaan yang dialami oleh manusia Indonesia pada tahun 1965 kiranya mencairkan kebekuan hati untuk mendengarkan dan menggali pelanggaran kemanusiaan yang pernah terjadi di tanah air.⁹ Sebab keluarga korban dan mereka yang menjadi korban merupakan manusia Indonesia yang pernah berjuang di bumi ini dan berhak untuk hidup secara damai.

Rumusan Masalah

1. Apa dampak pelanggaran Ham 1965 terhadap kaum muda Indonesia?

⁶ Wahyudi Akmaliah, "The Imagined Indonesia: The 1965-1966 Tragedy and the Emergence of Indonesian Exiles," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, no. 1 (2015): 65–77, www.indonesiandiaspora.com.au.

⁷ X-ray Diffraction Crystallography, *Menghadirkan Kembali Negara Praktik Keadilan Transisional Bagi Korban Peristiwa 1965 Di Palu, Sulawesi Tengah* Penulis:., 2016.

⁸ Indra Anugrah, M Ali B Siti, and Aisyah M Chaerul, "TELAAH PUTUSAN INTERNASIONAL PEOPLE ' S TRIBUNAL PELANGGARAN HAM 1965" 4, no. 1 (2023): 54–64.

⁹ Ramolan and Fatimah, "Yayasan Pejuang Hak Eks-Tapol 1965: Studi Pada YPKP 1965 Sumatera Barat."

2. Bagaimana Pelanggaran HAM yang Terjadi pada Tahun 1965 Mempengaruhi Akses Terhadap Pendidikan Bagi Kaum Muda di Indonesia?
3. Mengapa Pelanggaran HAM 1965 Berdampak pada Ketidaksetaraan dalam Peluang Pendidikan Bagi Kaum Muda di Indonesia?

Pelanggaran HAM 1965 : Dampaknya Terhadap Peluang Pendidikan Kaum Muda

3.1 Panorama Singkat Pelanggaran HAM 1965

Masyarakat Indonesia yang hidup dewasa ini harus mengetahui sejarah kelam bangsa Indonesia terkhusus pada tahun 1965. Membaca dan menengok kembali perjalanan bangsa sangatlah penting untuk menemukan jati diri bangsa yang tidak bisa dicabut dari sejarah. Sejarah bukan pengetahuan tentang peristiwa masa lalu melainkan peradaban dinamis yang memungkinkan generasi penerus untuk menata hidup yang baru. Penataan yang baru tentunya belajar dari peristiwa kelam masa lampau dengan cara mengolah, merumuskan secara bijaksana berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara agar peristiwa kelam masa lalu tidak akan terulang lagi¹⁰

Bangsa Indonesia sejak berdirinya berhadapan dengan berbagai macam pergolakan yang berujung pada kebrutalan karena kepentingan golongan tertentu. Sikap egoisme, prasangka buruk terhadap yang lain melahirkan penumpahan dara manusia yang tak bersalah di seluruh tanah air.¹¹ Salah satu peristiwa kejam yang masih membekas di sanubari masyarakat Indonesia hingga saat ini adalah pelanggaran HAM 1965 (Peristiwa G30S).¹² Apa yang terjadi pada masa ini? Artikel ini secara singkat mengurai panorama peristiwa kelam 1965 berdasarkan sumber yang dibaca melalui artikel dan buku-buku yang berisi kesaksian pelaku dan korban.

Peristiwa G30S, atau Gerakan 30 September, adalah peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965.¹³ Peristiwa diawali dengan pembunuhan enam perwira tinggi oleh kelompok satu Bataliyon Cakrabirawa di bawah komando letkol Inf. Untung. Jenazah para korban ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Dekat Pengkalan Halim Perdanakusuma, di tempat kaum kiri mengadakan latihan ala ketentaraan.¹⁴ Berdasarkan versi dan sumber resminya, penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa perwira tinggi merupakan bagian dari usaha kudeta yang dilakukan oleh kelompok PKI. Gerakan tersebut disebut sebagai gerakan 30 September/ PKI (G30S/PKI).¹⁵ Peristiwa tersebut disusul dengan pembantaian berpuluh ribu masyarakat Indonesia yang tak bersalah. Sejarah

¹⁰ Yustinus Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, "Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama Di Ruang Publik Yang Plural," *Diskursus* 2 17, no. 1 (2014): 143.

¹¹ Nurmalayani, Burhanuddin, and Mahyudi, "Subjek Kolektif Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye Yang Mencerminkan Sejarah PKI: Kajian Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann."

¹² Geonawan Mohamad, dalam (Majalah Tempo), *Dia yang terbatas* Edisi 24-30 September 2007, 170.

¹³ Nurmalayani, Burhanuddin, and Mahyudi, "Subjek Kolektif Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye Yang Mencerminkan Sejarah PKI: Kajian Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann."

¹⁴ A. Panambudi, *Fakta dan Rekayasa G30S Menurut Kesaksian Para Pelaku*, Yogyakarta: Medpres, 2011, 3.

¹⁵ Haris. Dkk Ashar, *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*, 2012.

mencatat bahwa penculikan dan pembunuhan para perwira AD (Angkatan Darat) memicu balas dendam besaran terhadap PKI dan simpatisannya.¹⁶ Target pembunuhan dan penahanan paksa adalah semua orang yang dituduh sebagai anggota PKI dan simpatisan atau mereka yang memiliki keterkaitan langsung dengan organisasi komunis.¹⁷

Pembunuhan massal terjadi sebagian besar karena kekuasaan dan kewenangan absolut yang dipandang Soeharto untuk mengambil langkah yang dianggap penting guna menghancurkan PKI.¹⁸ Muncul paraduga yang merebak pada tahun 1998-1999, tepat pada saat Jendral Besar (Purn) Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI. Intinya, Soeharto dianggap merupakan sosok oportunis yang tau akan terjadi penculikan terhadap para jenderal, tetapi membiarkannya dan bahkan mengambil keuntungan dari situasi yang kacau balau itu.¹⁹ Versi ini diperkuat dengan bukti-bukti berupa kedekatan hubungan antara Soeharto dan pelaku kunci G30 S seperti Letkol Untung (bekas anak buah Soeharto ketika bertugas dalam operasi pembebasan Irian Barat).

Pembunuhan atau penculikan enam jenderal perwira tinggi berdampak pada lebih dari tiga juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, pemerkosaan terhadap PKI dan simpatisan. Berdasarkan hasil penyelidikan komnas HAM, sekitar 32.774 diketahui telah hilang dan di beberapa tempat di ketahui menjadi lokasi pembantaian para korban.²⁰ Ada juga riset lain yang menyatakan bahwa korban lebih dari dua juta orang. Konsekuensi dari pemicu balas dendam terhadap PKI dan simpatisan berdampak pula pada keluarga korban, yang mengalami diskriminasi atas tuduhan sebagai keluarga PKI.²¹ Selain itu mereka kehilangan pekerjaan banyak diantaranya tidak bisa melanjutkan pendidikan, dikucilkan dari lingkungan sehingga mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Banyak manusia yang dituduh salah tanpa melewati proses peradilan (tidak ada peluang untuk membela diri) dihukum berat, disisihkan. Tragedi bangsa yang menelan ratusan ribu korban, luka batin.²²

Para ahli sejarah pada umumnya sepakat bahwa peristiwa pilu konflik G30S yang berujung pada pembantaian merupakan sebuah tragedi kemanusiaan terbesar bangsa Indonesia. Rana tragedinya bukan hanya mencakup fakta pembunuhan secara massal terhadap mereka yang kategori PKI melainkan terhadap keluarga dan anak-anak. Realitas ini juga memicu pada aktivitas pendidikan.²³ Sebagai keluarga korban anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah tentu merasa kecil dan diasingkan dari teman-teman. Situasi itu membuat semangat belajar anak-anak lemah dan putus asa. Selain itu anak-anak kehilangan sahabat baik yang seusia dalam belajar kelompok.

Dalam kontes kehidupan sehari-hari manusia tentunya secara konkret menginginkan, merindukan seseorang sahabat, orang tua. Kenyataan ini menunjukkan bahwa

¹⁶ Julius Pour G30S fakta atau Rekayasa, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2013,5.

¹⁷ Anugrah, Siti, and Chaerul, "Telaah Putusan International people 'S Tribunal Pelanggaran Ham 1965."

¹⁸ Nurmalayani, Burhanuddin, and Mahyudi, "Subjek Kolektif Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye Yang Mencerminkan Sejarah PKI: Kajian Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann."

²⁰ Anugrah, Siti, and Chaerul, "TELAH PUTUSAN INTERNATIONAL PEOPLE ' S TRIBUNAL PELANGGARAN HAM 1965."

²¹ Nurmalayani, Burhanuddin, and Mahyudi, "Subjek Kolektif Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye Yang Mencerminkan Sejarah PKI: Kajian Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann."12.

²² Meita Setianing Mulyadi et al., "Dalam Novel Pulang Dan Amba" 33, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.29255/aksara.v33i1.565.71>.

²³ Manusia Ham and D I Indonesia, "Penyelesaian Kasus Hak Asasi," no. 04 (2023).

anak-anak, kaum muda, orang tua pada masa itu sungguh mengalami kekurangan dan kepedihan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Oleh sebab itu kesadaran akan peristiwa masa lampau menjadi pelajaran berharga untuk menghormati yang lain.

3.2 Dampak Terhadap Peluang Pendidikan Kaum Muda Indonesia

Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka tentunya mengalami banyak kesulitan dalam berbagai hal salah satunya adalah pendidikan.²⁴ Presiden Soekarno memiliki rencana yang besar dalam membangun kemandirian dibidang ekonomi, politik dan struktur pemerintahan. Salah satu cara yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya manusia dan menciptakan generasi baru yang berpotensi dengan menyekolahkan putra-putri terbaik Indonesia ke negara-negara maju.²⁵ Akan tetapi rencana itu hilang dan imajinasi yang dibayangkan lenyap seiring dengan adanya peristiwa 1965. Selain itu mahasiswa yang berada di luar negeri mengalami kesulitan untuk kembali tanah air yang berakibat pada kemunculan eksil Indonesia di luar negeri yang membuat mereka menjadi warga negara tanpa negara (*Stateless*).²⁶ Mereka yang dinilai terkait dengan PKI dicabut paspornya, sehingga hak mereka sebagai warga negara Indonesia secara otomatis hilang. Konsekuensinya mereka tidak bisa kembali ke tanah air, terpisah dari keluarga, teman-teman dan hidup di pengasingan.²⁷ Kondisi itu membuat mereka hidup tanpa naungan dari negara asal dalam belantara di negeri-negeri asing tempat mereka menempuh pendidikan. Mereka mengalami kesulitan dalam berbagai hal, tanpa ada kejelasan dokumen terkait dengan kewarganegaraan formal yang dimiliki.²⁸

Mahasiswa mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak diantara mereka yang tidak memiliki uang karena terputusnya program beasiswa dari pemerintah Indonesia. Diantara Mahasiswa banyak mengalami depresi dalam menghadapi pergulatan hidup yang tidak pernah alami sebelumnya. Situasi ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupan kaum muda Indonesia sebagai masa depan bangsa. Kehidupan di negeri asing yang tanpa ada perlindungan dan pengawasan yang ketat adalah persoalan kemanusiaan yang tidak dilupakan dalam sejarah bangsa Indonesia. Realitas ini menggambarkan kepedihan mahasiswa yang semestinya menjadi tanggungjawab negara dalam mengatasinya. Masyarakat Indonesia yang pada masa itu dibaluti oleh penderitaan dan terisolasi oleh kesakitan yang tak kunjung sembuh. Hati nurani pemerintah Indonesia (mereka yang secara keji menaruh kekejaman terhadap PKI) kehilangan kesadaran akan martabat luhur sesama manusia.²⁹

Meskipun situasi masyarakat Indonesia mengalami penderitaan dan para mahasiswa Indonesia di negeri asing mengalami kesulitan dalam hidup mereka tidak memberontak. Mereka hanya diam mengungkapkan kebijaksanaan hidup yang tiada taranya. Mungkinkah

²⁴Mukti and Permana, "Membicarakan Sejarah Kontroversial: Historiografi, Ingatan Masyarakat Dan Pendidikan Sejarah Di Indonesia."

²⁵ Akmaliah, "The Imagined Indonesia: The 1965-1966 Tragedy and the Emergence of Indonesian Exiles."

²⁶ Dwinitas Ayuni Larasati, "Identitas Eksil Dalam Film Surat Dari Praha."

²⁷ Penyelesaian Dan et al., "35 - 50" 14, no. 2 (2019): 35-50.

²⁸ Mulyadi et al., "Dalam Novel Pulang Dan Amba."

²⁹ Rival Anggriawan Mainur, "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Di Indonesia," 2016, 2.

mereka melakukan perlawanan di tengah kekejaman para serdadu? Tentunya tidak, yang ada adalah sikap pasrah dan penyerahan diri secara total kepada sang Khalik. Mahasiswa yang di negeri asing meskipun tidak lagi menjadi warga negara Indonesia, ingatan dan aktivitas sosialnya tentang Indonesia Indonesia masih begitu kuat.³⁰ Mereka inilah yang diistilahkan oleh Benedict Anderson (1994) sebagai komunitas nasionalisme jarak jauh (*long-distance nationalisme*).

Di Indonesia banyak kaum muda yang mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan. Persitiwa pembunuhan secara masal terhadap keluarga mereka memicu lahirnya rasa trauma dan merasa asing di lingkungan masyarakat dan sekolah. Mahasiswa yang memiliki kecerdasan intelektual tidak bisa dan merasa takut untuk berpendapat. Pelanggaran HAM pada tahun 1965 di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peluang pendidikan generasi muda di negara ini. Kejadian tersebut telah merusak struktur pendidikan, membatasi akses terhadap ilmu pengetahuan, dan menciptakan ketakutan yang berkepanjangan dalam masyarakat.³¹ Para pelajar dan pemuda menjadi korban sistematis dari pelanggaran HAM, dengan banyak yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Keterlibatan mereka dalam aktivitas politik atau kritis di institusi pendidikan menjadi pemicu penindasan.³² Akibatnya, banyak kaum muda kehilangan hak untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi pada pembangunan negara. Dampak ini terus terasa dalam sistem pendidikan saat ini, mempengaruhi kesetaraan akses pendidikan bagi generasi mendatang.

Keterbatasan Akses Pendidikan. Peristiwa pelanggaran HAM 1965 di Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keterbatasan akses pendidikan bagi kaum muda. Salah satunya adalah pemutusan karir pendidikan bagi individu yang terlibat atau dicurigai terlibat PKI atau simpatisan. Banyak siswa dan mahasiswa dihentikan dari sekolah atau perguruan tinggi, mengakibatkan terputusnya proses pendidikan mereka. Gejolak politik dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dan kampus juga mengganggu proses belajar generasi muda. Anak-anak dari keluarga korban atau simpatisan sering menghadapi diskriminasi dalam akses pendidikan, dengan penolakan dari institusi pendidikan atau bahkan tindakan kekerasan terhadap mereka dan keturunan mereka.³³

Keterbatasan akses pendidikan bagi kaum muda adalah salah satu dampak yang signifikan dari peristiwa pelanggaran HAM 1965 di Indonesia. Peristiwa tersebut telah menyebabkan berbagai hambatan yang menghalangi generasi muda dalam menjalani pendidikan yang layak. *Pertama*, terjadi pemutusan karir pendidikan dan pengasingan terhadap kelompok yang terlibat atau dicurigai terlibat dalam peristiwa tersebut. Banyak individu yang dihentikan dari sekolah atau perguruan tinggi, menyebabkan putusnya rantai pendidikan dan mengurangi peluang untuk meraih pendidikan tinggi. *Kedua*, pelanggaran HAM tersebut menciptakan atmosfer ketidakstabilan politik dan sosial yang memengaruhi kegiatan pendidikan. Siswa dan mahasiswa mengalami gangguan dalam proses belajar

³⁰ Mohammad Maiwan, "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Lama: Suatu Perspektif Historis," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 14, no. 2 (2015): 49–63, <https://doi.org/10.21009/jimd.v14i2.9105>.

³¹ Nadia Annastasia Ningrum, "Analisis Resepsi Aktivistis Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Di Surabaya Terhadap Isu Komunisme Dalam Film Senyap," *Journal* 06 (2022): 134–42.

³² Maiwan, "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Lama: Suatu Perspektif Historis."

³³ Universitas Sanata Dharma, "Prosiding Seminar Nasional FKIP 2018, Desember 2018 [Http://Usd.Ac.Id/Snfkip2018](http://Usd.Ac.Id/Snfkip2018), Yogyakarta, Indonesia," *Pendidikan*, no. 2 (2018): 171–80.

mereka akibat gejolak politik dan tindakan keras yang terjadi di lingkungan sekolah dan kampus.³⁴

Keterbatasan akses pendidikan bagi kaum muda merupakan masalah serius yang masih berdampak hingga saat ini. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mempromosikan inklusi, kebebasan akademik, dan memperjuangkan kesetaraan pendidikan sebagai upaya memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki akses yang lebih baik dan setara ke pendidikan yang berkualitas untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Ketidaksetaraan Pendidikan. Salah satu dampak terbesar pelanggaran HAM 1965 adalah ketidaksetaraan dalam pendidikan. Kaum muda dari keluarga yang terlibat atau diduga terlibat dalam peristiwa tersebut seringkali menghadapi diskriminasi. Keluarga korban berhadapan dengan penolakan dari institusi pendidikan atau bahkan menghadapi kekerasan fisik, tidak mendapatkan pendidikan yang layak.³⁵ Realitas ini menghambat perkembangan sosial dan ekonomi khususnya peluang untuk meningkatkan taraf hidup.³⁶

Dampak pelanggaran HAM 1965 terhadap peluang pendidikan kaum muda Indonesia masih dirasakan hingga hari ini. Pembatasan ideologi, pengaruh pada kualitas pendidikan, dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan adalah isu-isu yang masih menjadi perhatian.³⁷ Upaya untuk mengatasi dampak negatif ini termasuk dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif, serta memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas yang akan membantu mereka menghadapi tantangan masa depan.

3.3 Rekonsiliasi Dampak Pelanggaran ham 1965 Terhadap Peluang Pendidikan kaum Muda Indonesia

Rekonsiliasi dalam konteks dampak pelanggaran hak asasi manusia tahun 1965 di Indonesia memiliki implikasi signifikan terhadap peluang pendidikan generasi muda Indonesia. Rekonsiliasi adalah salah satu bentuk upaya penyelesaian yang paling mungkin dan bijaksana sebagai proses penuntun hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan dan pelanggaran Ham masa lalu.³⁸ Rekonsiliasi tidak bisa dijalankan tanpa pengungkapan kebenaran. Sebuah kebenaran akan memiliki makna yang mendalam ketika dilanjutkan pada tindakan rekonsiliatif. Pengungkapan kebenaran bukanlah saat untuk menaruh dendam tetapi untuk menampilkan keluhuran martabat dan harkat manusia sebagaimana mestinya. Rekonmensingiliasi mengedepankan penghargaan terhadap nilai keluhuran martabat manusia mengandaikan kebenaran.

³⁴ Eggy Fajar Andalas and Arif Budi Wuriyanto, "Anak Dalam Pusaran Tragedi: Memori Peristiwa 1965 Dalam Candik Ala 1965 Karya Tinuk R. Yampolsky Eggy," *Prosiding Seminar Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, no. 4 (2020): 358–66, <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA>.

³⁵ Andalas and Wuriyanto.

³⁶ Anugrah, Siti, And Chaerul, "Telaah Putusan International People ' S Tribunal Pelanggaran Ham 1965."

³⁷ Andalas and Wuriyanto, "Anak Dalam Pusaran Tragedi: Memori Peristiwa 1965 Dalam Candik Ala 1965 Karya Tinuk R. Yampolsky Eggy."

³⁸ Sebagai Analisis, H A M Atas, and Regulasi Dan, "Peraturan Perundang-Undangan Melalui Proses Rekonsiliasi" 1 (2022): 151–65.

Rekonsiliasi didasarkan kemauan untuk berdamai dengan masa lalu dan bersama-sama bersepakat membangun masa depan secara damai berlandaskan pada asas perdamaian dan keadilan. Pelanggaran hak asasi manusia 1965 berdampak pada penganiayaan, penahanan, dan pembunuhan terhadap sejumlah besar orang yang dianggap memiliki keterkaitan dengan komunisme, meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah bangsa.³⁹

Pelanggaran Hak asasi manusia sering kali meninggalkan masalah kemanusiaan yang memicu konflik baru dalam lingkungan masyarakat oleh sebab itu Indonesia secara hukum perlu adanya rekonsiliasi yang dijamin hukum nasional dan ternasional demi tercapainya kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat.⁴⁰ Meskipun sudah ada peraturan undang-undang mengenai hak asasi manusia masih banyak pelanggaran ham yang terjadi yang masih membekas di sanubari masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan problem pelanggaran Ham berat di Indonesia yang penyelesaiannya melalui rekonsiliasi, meskipun hingga sekarang belum terselesaikan.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab negara Indonesia secara hukum wajib melakukan pemulihan terhadap korban melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi menjadi penting dalam upaya menyembuhkan luka-luka tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil. Rekonsiliasi memungkinkan terbukanya ruang dialog, keadilan, dan kebenaran, yang dapat membantu masyarakat Indonesia untuk menanggapi peristiwa sejarah secara positif.⁴¹ Rekonsiliasi menciptakan kesempatan untuk menghindari perpecahan sosial yang berkelanjutan dan mendukung penguatan demokrasi. Dalam konteks pendidikan, rekonsiliasi dapat membuka pintu untuk kurikulum yang lebih inklusif dan berimbang, yang memungkinkan generasi muda untuk memahami sejarahnya dengan lebih baik, tanpa terkungkung oleh paradigma politik masa lalu.⁴²

Pentingnya rekonsiliasi terhadap dampak pelanggaran 1965 terhadap pendidikan juga dapat dilihat dalam upaya menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan kritis, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Hal ini dapat menciptakan landasan yang lebih kuat bagi perkembangan pendidikan yang inklusif, berfokus pada pemahaman, toleransi, dan keadilan.⁴³ Dengan demikian, rekonsiliasi dapat memainkan peran penting dalam menciptakan peluang pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia, yang akan berdampak positif pada perkembangan bangsa dan masyarakatnya.

Rekonsiliasi dalam konteks dampak pelanggaran hak asasi manusia tahun 1965 di Indonesia memiliki implikasi besar pada peluang pendidikan kaum muda. Peristiwa tersebut meninggalkan luka dan ketidakpastian dalam sejarah bangsa, dan rekonsiliasi menjadi kunci

³⁹ Mukti and Permana, "Membicarakan Sejarah Kontroversial: Historiografi, Ingatan Masyarakat Dan Pendidikan Sejarah Di Indonesia."

⁴⁰ Andrey Sujatmoko, "Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (2016): 330–50, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6>.

⁴¹ Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, "Mengabdikan Tuhan Dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama Di Ruang Publik Yang Plural."

⁴² Yohanes Alfrid Aliano and F.X. Eko Armada Riyanto, "Pemulihan Martabat Manusia Dalam Perspektif Metafisika Persahabatan," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 2 (2022): 162–72, <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i2.42402>.

⁴³ Mathias Jebaru Adon and Agustinus Asman, "Konsep Filosofis Budaya Peler Manggarai Dalam Terang Filsafat Dialogis Martin Buber," *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 8, no. 2 (2022): 197–223, <https://doi.org/10.36424/jpsb.v8i2.329>.

untuk menyembuhkan dan memahami masa lalu. Penyembuhan itu bukan hanya sebatas pada teori pada masa lampau melainkan meningkatnya akses pendidikan yang memadai diseluruh tanah air, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Selain itu hendaklah pendidikan menjadi sorotan utama dewasa ini karena realitasnya ada sekian banyak anak-anak di pelosok tanah air tidak mendapatkan pendidikan yang layak.⁴⁴ Hal itu disebabkan karena kurangnya tenaga pendidik, minimnya kreativitas (kurang profesional) dalam mendidik anak-anak bangsa.

Oleh sebab itu Pelatihan guru tentang cara mengajar materi yang sensitif juga diperlukan. Selain itu, sumber daya pendidikan yang beragam, seperti perpustakaan dan dokumentasi, harus tersedia untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Dialog dan diskusi terbuka antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk korban dan keluarga mereka, juga perlu didorong. Pemerintah juga harus mendukung kebijakan yang mempromosikan rekonsiliasi dan pendidikan inklusif serta memberikan kompensasi kepada korban. Melalui langkah-langkah ini, rekonsiliasi dapat memainkan peran penting dalam membuka peluang pendidikan yang lebih baik bagi kaum muda Indonesia, membantu mereka memahami sejarahnya, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.⁴⁵

Bentuk lain dari rekonsiliasi adalah berani melakukan pengakuan terhadap kesalahan, penuntutan hukum, pemaafan pengampunan dan memberikan reparasi individu atau simbolik kepada para korban kejahatan Ham.⁴⁶ Ini semua adalah bagian dari tindakan-tindakan untuk mengembangkan makna-makna baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Mendengarkan suara korban Ham merupakan langkah minimal agar peristiwa kelam dapat dimaafkan dan tidak akan menimbulkan curiga dan kebencian.⁴⁷ Langkah ini sekaligus proses untuk mencapai perdamaian serta pemaknaan nilai-nilai hidup bersama.

3.4 Relevansi Pelanggaran ham 1965 Terhadap Peluang pendidikan kaum muda Indonesia Dewasa ini

Dampak pelanggaran Ham pada 1965 masih sangat relevan dengan konteks pendidikan dewasa ini. Artinya bahwa peristiwa kelam masa lampau menjadi pelajaran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mengetahui bahwa Indonesia pernah mengalami peristiwa kelam dalam menempuh pendidikan yang memadai sebagai dampak dari peristiwa G30s PKI.⁴⁸ Peristiwa masa lampau bukan hanya sekedar kisah melainkan sebagai pengalaman untuk ke depannya jangan sampai bangsa ini kembali terjerumus dalam kebrutalan dan keberingasan sendiri. Mengingat dan mengetahui masa lalu membuat generasi muda belajar dan memetik hikmah dari yang baik dan buruk. Sesuatu yang buruk pada masa lalu akan menjadi peringatan agar tidak terulang di masa kini dan mendatang. Ingatan masa lalu yang buruk dan penuh derita akan menjadikan manusia berusaha menghindarinya.

⁴⁴ Dan et al., "35 - 50."

⁴⁵ Maiwan, "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Lama: Suatu Perspektif Historis."

⁴⁶ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2014, 104.

⁴⁷ Sujatmoko, "Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional."

⁴⁸ Mainur, "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Di Indonesia."

Relevansi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada tahun 1965 terhadap peluang pendidikan kaum muda Indonesia dewasa ini sangat penting. Meskipun peristiwa tersebut terjadi puluhan tahun yang lalu, dampaknya masih dirasakan dalam perkembangan sosial, politik, dan pendidikan di Indonesia.⁴⁹ Pelanggaran HAM tersebut menciptakan ketidakpastian dan ketakutan yang berlanjut dalam masyarakat, yang secara tidak langsung memengaruhi pemahaman dan perspektif generasi muda terhadap sejarah bangsa.⁵⁰ Pelanggaran HAM 1965 menimbulkan ketidakseimbangan dalam kurikulum sejarah, seringkali menyajikan pandangan yang berpihak pada pemerintah pada masa itu. Hal ini menghambat pemahaman yang seimbang tentang periode tersebut dan menghalangi pembelajaran yang kritis dan inklusif.⁵¹ Semua dampak dari peristiwa 1965 sangat memengaruhi dan mengganggu harmoni keluhuran manusia, sebagai makhluk yang berpotensi untuk bebas bertindak dan mengembangkan kemampuan diri.

Oleh karena itu, untuk menciptakan peluang pendidikan yang lebih baik, perlu dilakukan revisi kurikulum yang lebih berimbang dan inklusif. Pelatihan guru untuk mengajar materi yang sensitif dengan etika dan objektivitas juga menjadi penting. Selain itu, rekonsiliasi dan dialog terbuka antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk korban dan keluarga mereka, diperlukan untuk memahami sejarah dengan lebih baik dan mempromosikan toleransi serta keadilan.⁵² Pemerintah juga harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang mendukung rekonsiliasi, memfasilitasi kompensasi bagi korban, dan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan bagi semua warga negara. Menyadari hal itu penting sekali mengedepankan rasionalitas bukan emosionalitas, kecerdasan bukan manipulasi sehingga kaum muda Indonesia mampu membaca tanda-tanda dunia berlandaskan pada ilmu pengetahuan yang mencerdaskan bangsa.⁵³ Dengan cara ini, generasi muda Indonesia dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarahnya, dan pendidikan mereka dapat menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan toleransi.

KESIMPULAN

Pelanggaran HAM 1965 di Indonesia telah secara substansial merusak peluang pendidikan bagi kaum muda. Dampaknya masih terasa dalam sistem pendidikan saat ini. Generasi muda menjadi korban yang kehilangan akses, terutama dalam hal kebebasan berpikir dan berekspresi di institusi pendidikan. Hal ini menciptakan hambatan bagi mereka dalam mengakses kesempatan pendidikan yang setara. Pentingnya memperbaiki dan memastikan akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi generasi muda menjadi krusial agar mereka dapat berkembang secara optimal dan menjadi kontributor yang produktif dalam pembangunan masa depan Indonesia.

⁴⁹ Program Studi et al., “Analisis Resepsi Aktivistis Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus di Surabaya Terhadap Isu Komunisme Dalam Film Senyap Nadia Anastasia Ningrum Abstrak” 06 (2022): 134–42.

⁵⁰ Analisis, Atas, and Dan, “Peraturan Perundang-Undangan Melalui Proses Rekonsiliasi.”

⁵¹ Analisis, Atas, and Dan.

⁵² Mainur, “Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Di Indonesia.”

⁵³ Oleh Abdul et al., *Perlindungan Perlindungan*, vol. I, 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Oleh, Hakim G Nusantara, Oleh Galuh, and Laetitia Bonnet. *Perlindungan Perlindungan*. Vol. I, 2014.
- Adon, Mathias Jebaru, and Agustinus Asman. "Konsep Filosofis Budaya Peler Manggarai Dalam Terang Filsafat Dialogis Martin Buber." *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 8, no. 2 (2022): 197–223. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v8i2.329>.
- Akmaliah, Wahyudi. "The Imagined Indonesia: The 1965-1966 Tragedy and the Emergence of Indonesian Exiles." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, no. 1 (2015): 65–77. www.indonesiandiaspora.com.au.
- Aliano, Yohanes Alfrid, and F.X. Eko Armada Riyanto. "Pemulihan Martabat Manusia Dalam Perspektif Metafisika Persahabatan." *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 2 (2022): 162–72. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i2.42402>.
- Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, Yustinus. "Mengabdikan Tuhan Dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama Di Ruang Publik Yang Plural." *Diskursus* 2 17, no. 1 (2014): 143.
- Analisis, Sebagai, H A M Atas, and Regulasi Dan. "Peraturan Perundang-Undangan Melalui Proses Rekonsiliasi" 1 (2022): 151–65.
- Andalas, Eggy Fajar, and Arif Budi Wuriyanto. "Anak Dalam Pusaran Tragedi: Memori Peristiwa 1965 Dalam Candik Ala 1965 Karya Tinuk R. Yampolsky Eggy." *Prosiding Seminar Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, no. 4 (2020): 358–66. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA>.
- Anugrah, Indra, M Ali B Siti, and Aisyah M Chaerul. "Telaah Putusan International People ' S Tribunal Pelanggaran Ham 1965" 4, no. 1 (2023): 54–64.
- Ashar, Haris. Dkk. *Menyusun Puzzle Pelanggaran Ham 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*, 2012.
- Crystallography, X-ray Diffraction. *Menghadirkan Kembali Negara Praktik Keadilan Transisional Bagi Korban Peristiwa 1965 Di Palu, Sulawesi Tengah Penulis.*, 2016.
- Dan, Penyelesaian, Pengembalian Tahanan, Pulau Buru, K E Masyarakat, and Sarkawi B Husain. "35 - 50" 14, no. 2 (2019): 35–50.
- Dharma, Universitas Sanata. "Prosiding Seminar Nasional FKIP 2018 , Desember 2018 [Http://Usd.Ac.Id/Snfkip2018](http://Usd.Ac.Id/Snfkip2018) Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia." *Pendidikan*, no. 2 (2018): 171–80.
- Dwinitas Ayuni Larasati. "Identitas Eksil Dalam Film Surat Dari Praha," no. 4 (2019): 1–12.
- Ham, Manusia, and D I Indonesia. "Penyelesaian Kasus Hak Asasi," no. 04 (2023).
- Mainur, Rival Anggriawan. "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Di Indonesia," 2016, 2.
- Maiwan, Mohammad. "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Lama: Suatu Perspektif Historis." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 14, no. 2 (2015): 49–63. <https://doi.org/10.21009/jimd.v14i2.9105>.
- Mukti, Anung Jati Nugraha, and Johan Inda Permana. "Membicarakan Sejarah Kontroversial: Historiografi, Ingatan Masyarakat Dan Pendidikan Sejarah Di Indonesia." *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya* 17, no. 1 (2023): 105. <https://doi.org/10.17977/um020v17i12023p105-122>.

- Mulyadi, Meita Setianing, Candra Rahma, Wijaya Putra, Universitas Muhammadiyah, Malang Jalan, and Jawa Timur. "Dalam Novel Pulang Dan Amba" 33, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29255/aksara.v33i1.565.71>.
- Nurmalayani, Ayu, Burhanuddin, and Johan Mahyudi. "Subjek Kolektif Novel Tentang Kamu Karya Tere Liye Yang Mencerminkan Sejarah PKI: Kajian Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann." *Mabasan* 15, no. 2 (2021): 201–20. <https://doi.org/10.26499/mab.v15i2.424>.
- Pour Julius. *G30S fakta atau Rekayasa*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2013.
- Ramolan, Aulia;, and Siti Fatimah. "Yayasan Pejuang Hak Eks-Tapol 1965: Studi Pada YPKP 1965 Sumatera Barat." *Kronologi* 3, no. 3 (2021): 14–26.
- Nadia Annastasia Ningrum "ANALISIS RESEPSI AKTIVIS ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS DI SURABAYA TERHADAP ISU KOMUNISME DALAM FILM SENYAP, *Program, Studi S I lmu, Jurusan Ilmu Sosial, and Fakultas Ilmu.*" 06 (2022): 134–42.
- Sujatmoko, Andrey. "Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (2016): 330–50. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a6>.
- Geonawan Mohamad, dalam (Majalah Tempo), *Dia yang terbatas* Edisi 24-30 September 2007.